

Transformasi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Mencari Solusi atas Hambatan Struktural dan Ekonomi

Tiara Maharani*¹⁾

¹⁾ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

e-mail correspondence: 21011010003@student.upnjatim.ac.id

Received: 05-07-2025

Revised: 25-08-2025

Accepted: 31-08-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Sustainable Development;
Structural Barriers;
Economic Transformation

Sustainable development in Indonesia faces various structural and economic obstacles that hinder the effectiveness of policies and the implementation of sustainability programs. This study aims to identify the main challenges in sustainable development and offer policy solutions based on data and empirical analysis. The research method uses a quantitative approach with statistical data analysis from official sources such as the Central Bureau of Statistics (BPS) and Bank Indonesia. The results of the study show that the main factors hindering sustainable development in Indonesia include limited institutional capacity, uneven economic growth across regions, and low investment in environmentally friendly technologies. The study concludes by emphasizing the importance of policy reforms that support enhancing institutional capacity, decentralizing economic development, and integrating sustainable technologies into national development planning.

Kata Kunci:

Pembangunan
Berkelanjutan; Hambatan
Struktural; Transformasi
Ekonomi

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia menghadapi berbagai hambatan struktural dan ekonomi yang menghambat efektivitas kebijakan serta implementasi program keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala utama dalam pembangunan berkelanjutan serta menawarkan solusi kebijakan berbasis data dan analisis empiris. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data statistik dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penghambat pembangunan berkelanjutan di Indonesia mencakup keterbatasan kapasitas institusi, ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah, serta rendahnya investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Kesimpulan penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas institusional, desentralisasi pembangunan ekonomi, serta integrasi teknologi berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional.

INTRODUCTION

Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan (Nations, 2015). Di Indonesia, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Namun, masih terdapat berbagai tantangan struktural dan ekonomi yang menghambat implementasi kebijakan ini (Alisjahbana & Murniningtyas, 2021).

Hambatan utama meliputi infrastruktur yang belum merata, ketimpangan ekonomi antarwilayah, serta keterbatasan kapasitas institusional dalam mengelola sumber daya berkelanjutan (Bank, 2022). Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif seperti pertambangan dan deforestasi memperburuk dampak lingkungan serta menghambat transisi menuju ekonomi hijau (OECD, 2021).

Dari perspektif lingkungan, laju deforestasi yang tinggi dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali menjadi ancaman bagi keberlanjutan ekosistem. Laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023) menunjukkan bahwa laju deforestasi Indonesia masih mencapai 115 ribu hektar per tahun, yang berdampak pada penurunan biodiversitas dan peningkatan emisi karbon. Hal ini berkontribusi terhadap krisis iklim global serta mengurangi daya dukung lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan industri semakin memperburuk kondisi lingkungan, yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Dari segi sosial, kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi faktor yang menghambat pembangunan berkelanjutan. Data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di beberapa daerah tertinggal masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang lebih inklusif diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada identifikasi hambatan utama dalam pembangunan berkelanjutan serta menawarkan solusi kebijakan berbasis data dan analisis empiris untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan memahami faktor-faktor yang menghambat pembangunan berkelanjutan, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier untuk mengukur hubungan antara variabel pembangunan ekonomi, jumlah investasi hijau, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Selain itu, analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi tren ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Hasil

Hambatan Struktural dalam Pembangunan Berkelanjutan

Hambatan struktural mencakup lemahnya koordinasi antar-lembaga dalam implementasi kebijakan, ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam sektor energi terbarukan. Berdasarkan data BPS, ketimpangan pembangunan di Indonesia masih tinggi dengan indeks gini sebesar 0,384 (BPS, 2023a). Data menunjukkan bahwa hanya 23% dari total investasi energi di Indonesia dialokasikan untuk proyek energi hijau, sementara sisanya masih didominasi oleh energi fosil (International Energy Agency, 2023). Selain itu, kebijakan pemerintah yang kurang konsisten dalam mendukung pembangunan berkelanjutan juga menjadi kendala. Misalnya, meskipun terdapat berbagai insentif untuk industri hijau, masih terdapat regulasi yang tumpang tindih dan membatasi investasi di sektor energi terbarukan.

Selain itu, kurangnya edukasi dan pelatihan bagi tenaga kerja di sektor energi hijau juga menjadi hambatan utama. Banyak tenaga kerja yang masih belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri hijau, sehingga memperlambat proses transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat program pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga

kerja guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor ini. Dengan adanya program pelatihan yang efektif, diharapkan tenaga kerja lokal dapat lebih siap berkontribusi dalam pengembangan energi terbarukan.

Tabel 1: Investasi Energi Hijau dibandingkan Energi Fosil di Indonesia (dalam miliar USD)

Tahun	Energi Hijau	Energi Fosil
2020	3,5	14,2
2021	4,1	13,8
2022	5,0	13,5
2023	5,7	12,9

Sumber: *International Energy Agency* (IEA, 2023), Bank Indonesia (2023)

2. Discussion

Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial

Wilayah Indonesia Timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan Pulau Jawa, dengan kontribusi PDB hanya sebesar 15% dari total nasional (Indonesia, 2023). Selain itu, angka kemiskinan di Indonesia Timur masih tinggi, dengan tingkat kemiskinan di Papua mencapai 26,8% dibandingkan rata-rata nasional 9,54% (BPS, 2023a). Keterbatasan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur terlihat dari minimnya akses transportasi yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat ekonomi nasional. Jalan dan jalur distribusi yang kurang memadai menyebabkan biaya logistik yang tinggi, yang pada akhirnya menghambat aktivitas ekonomi dan investasi (PUPR, 2023). Selain itu, ketersediaan listrik dan jaringan internet yang belum merata juga menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi digital dan industri kreatif di kawasan ini.

Dari aspek sosial, angka partisipasi sekolah di wilayah Indonesia Timur masih lebih rendah dibandingkan wilayah lain. Data dari (BPS, 2023b) menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah di Papua hanya mencapai 65%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 85%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak anak-anak di wilayah tersebut yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai, yang berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja di masa depan. Ketimpangan ekonomi ini juga semakin diperparah oleh tingkat pengangguran yang tinggi akibat terbatasnya lapangan kerja formal. Sektor informal masih mendominasi perekonomian di Indonesia Timur, dengan banyak masyarakat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan yang memiliki tingkat produktivitas rendah serta rentan terhadap perubahan iklim (FAO, 2023). Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dalam meningkatkan akses infrastruktur, investasi, dan pendidikan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Solusi Kebijakan dan Rekomendasi Strategis

Reformasi Regulasi

Penyederhanaan birokrasi dan pemberian insentif investasi hijau merupakan langkah penting dalam mendorong sektor industri yang lebih berkelanjutan. Regulasi yang terlalu kompleks sering kali menghambat pertumbuhan ekonomi karena menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel dan proaktif dalam mendukung investasi yang berorientasi pada keberlanjutan, termasuk dalam hal perizinan lingkungan dan kemudahan berusaha bagi pelaku industri ramah lingkungan (Alisjahbana & Murniningtyas, 2021).

Desentralisasi Ekonomi

Ketimpangan ekonomi antarwilayah dapat dikurangi dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan di luar Pulau Jawa. Pemerataan pembangunan ekonomi ke daerah-daerah terpencil dapat dilakukan melalui peningkatan konektivitas transportasi, listrik, dan akses digital. Dengan demikian, daerah di luar Jawa dapat menarik lebih banyak investasi dan menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan kawasan industri hijau di wilayah timur Indonesia dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah (OECD, 2021).

Integrasi Teknologi Hijau

Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan fiskal yang lebih mendukung adopsi teknologi hijau. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan ekonomi sirkular dan teknologi ramah lingkungan. Misalnya, perusahaan yang menggunakan energi terbarukan atau menerapkan praktik produksi yang lebih efisien dalam mengurangi limbah dapat diberikan pemotongan pajak atau fasilitas pinjaman berbunga rendah. Dengan kebijakan ini, industri akan lebih terdorong untuk beralih ke model bisnis yang lebih berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global (Bank, 2022).

CONCLUSION(KESIMPULAN)

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan yang bersumber dari hambatan struktural dan ekonomi. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, rendahnya kapasitas institusional, serta kurangnya investasi dalam energi hijau menjadi faktor utama yang menghambat kemajuan. Data empiris dari BPS dan Bank Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi masih menjadi kendala yang harus diatasi melalui kebijakan yang lebih inklusif dan terintegrasi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih progresif dan berbasis data, dengan fokus pada desentralisasi ekonomi serta percepatan adopsi teknologi hijau. Peningkatan kapasitas kelembagaan, insentif investasi di sektor energi terbarukan, serta program peningkatan kesejahteraan sosial di daerah tertinggal adalah langkah-langkah strategis yang dapat diambil. Dengan implementasi kebijakan yang tepat dan berbasis bukti, diharapkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat.

REFERENCES

- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2021). Sustainable Transport, Sustainable Development. In Sustainable Transport, Sustainable Development.
<https://doi.org/10.18356/9789210010788>
- Bank, W. (2022). Indonesia Economic Prospects (IEP), June 2022: Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery. Worldbank.Org.
<https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospects-iep-june-2022-financial-deepening-for-stronger-growth-and-sustainable-recovery>
- BPS. (2023a). Indikator Ekonomi Desember 2023. Bps.Go.Id.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/29/4654a06f7be1fdd7bb99d4d4/indi>

- [kator-ekonomi-desember-2023.html](#)
- BPS. (2023b). Statistik Pendidikan 2023. Bps.Go.Id.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/24/54557f7c1bd32f187f3cdab5/statistik-pendidikan-2023.html>
- FAO. (2023). The State of World Fisheries and Aquaculture. Fao.Org.
<https://www.fao.org/publications/fao-flagship-publications/the-state-of-world-fisheries-and-aquaculture/en>
- Indonesia, B. (2023). Laporan Perekonomian Indonesia 2023. Lpi.Co.Id.
<https://lpi.co.id/kaleidoskop/index/2023>
- International Energy Agency. (2023). *World Energy Outlook 2023 | Enhanced Reader*.
23–28. <https://www.iea.org/news/the-energy-world-is-set-to-change-significantly-by-2030-based-on-today-s-policy-settings-alone>
- Nations, U. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Sdgs.Un.Org.
<https://sdgs.un.org/2030agenda>
- OECD. (2021). Going for Growth: Shaping a Vibrant Recovery. In *Economic Policy Reforms 2021*
<https://www.oecd-ilibrary.org/sites/09d6727f-en/index.html?itemId=/content/component/09d6727f-en>
- PUPR. (2023). Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR Tahun 2023. Data.Pu.Go.Id.
<https://data.pu.go.id/buku-informasi-statistik-infrastruktur-pupr-tahun-2023-1>